

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN
UPAH DENGAN PENAMBAHAN BEBAN KERJA
PADA PENGASUH BAYI (*BABYSITTER*)
(Studi Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**AULIA ANISA
NPM. 1721030128**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN
UPAH DENGAN PENAMBAHAN BEBAN KERJA
PADA PENGASUH BAYI (*BABYSITTER*)
(Studi Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Hukum Syariah (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Syariah

Oleh:

AULIA ANISA

NPM. 1721030128

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : DR. H. Yusuf Baihaqi, LC., M.A.

Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

ABSTRAK

Upah merupakan imbalan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain atas pekerjaan orang yang telah diselesaikan. Upah dalam Islam secara umum masuk dalam *'Ijārah*. *'Ijārah* dalam hal ini adalah memanfaatkan jasa seseorang yang disewa untuk dimanfaatkan tenaganya dengan perjanjian kerja tertentu. Sebelum bekerja majikan calon pekerjanya yang dalam hal ini yaitu seorang pengasuh bayi (*Babysitter*) melakukan kesepakatan kerja terlebih dahulu, karena menyangkut pada letak hak dan kewajiban keduanya agar tidak timbul adanya unsur pemaksaan dan ketidakjelasan dikemudian hari. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada pengasuh bayi (*Babysitter*) Kelurahan Rajabasa Raya dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada pengasuh bayi (*Babysitter*) Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada pengasuh bayi (*Babysitter*) Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung dan untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada pengasuh bayi (*Babysitter*) Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan memakai metode berpikir deduktif. Data primer dalam penelitian ini didapat langsung dari hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan yaitu majikan dan *Babysitter*, sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan. Untuk sampel pada penelitian ini sejumlah 5 orang majikan dan 5 orang *Babysitter*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data melalui pemeriksaan data dan sistematika data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada pengasuh bayi (*Babysitter*) terdapat hal yang menyimpang dalam pelaksanaannya, antara majikan dan *Babysitter* dalam praktiknya terjadi ketidaksesuaian dalam melaksanakan akad, penambahan beban kerja yang sengaja dilakukan oleh majikan diluar akad

perjanjian yang telah disepakati bersama hal tersebut tentunya merugikan salah satu pihak menguntungkan pihak lain. hal tersebut juga dapat mengakibatkan rusaknya akad perjanjian yang terjalin serta mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keabsahan dalam akad. Meskipun dalam praktik pembayaran upahnya telah sesuai dengan akad perjanjian di awal, namun penambahan beban kerja tersebut dapat mendatangkan *mudharat* karena terdapat pihak yang dirugikan.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Anisa
NPM : 1721030128
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah dengan Penambahan Beban Kerja pada Pengasuh Bayi (*Babysitter*) (Studi Kasus Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan diaplikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka bertanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Oktober 2021

Penulis,



Aulia Anisa
1721030128



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama : Aulia Anisa
NPM : 172103128
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah dengan Penambahan Beban Kerja Pada Pengasuh Bayi (*Babysitter*) (Studi Kasus Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

DR. H. Yusuf Baihaqi, LC., M.A.

NIP. 197403072000121002

Pembimbing II

Muslim, S.H.I M.H.I

NIP. -

Mengetahui

Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah dengan Penambahan Beban Kerja Pada Pengasuh Bayi (Babysitter) (Studi Kasus Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung)”** disusun oleh, **Aulia Anisa**, NPM: **1721030128**, program studi **Hukum Ekonomi Syari'ah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di **Fakutas Syariah UIN Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal: **Rabu, 06 Oktober 2021**.

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, MSI (.....)

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S. Ud., M. A (.....)

Penguji I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H (.....)

Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A (.....)

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031

MOTTO

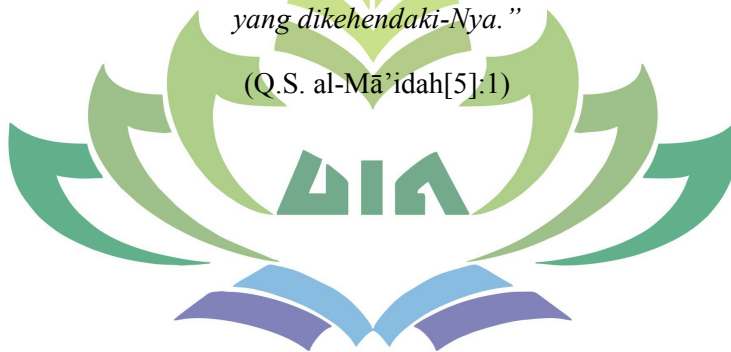
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

(سورة المائدة : ١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

*Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan
tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah
menetapkan hukumhukum menurut
yang dikehendaki-Nya.”*

(Q.S. al-Mā'idah[5]:1)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmad-nya karya ini dapat diselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua Orangtuaku, terimakasih atas setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbankan untukku, atas segala pengorbanan, senantiasa selalu mendoakan di setiap waktunya, sabar memberaskanku, menjaga, dan selalu memberikan dukungan penuh dalam moril dan materil, serta curahan kasih dan sayang yang tak terhingga, semoga kelak dapat membanggakan untuk kedua orang tua, dan keluarga lainnya, semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia maupun akhirat.
2. Adikku tercinta, terimakasih atas segala do'a dukungan dan kasih sayang.



RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Aulia Anisa lahir di Gunung Sugih pada tanggal 04 juli 1999. Penulis mempunyai riwayat pendidikan sekolah dasar Negeri (SDN) 03 Cimanuk pada tahun 2005 dan selesai tahun 2011, MTs N 1 Pesawaran pada tahun 2011 dan selesai Tahun 2014, MAN 1 Pesawaran pada tahun 2014 dan selesai pada Tahun 2017. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan lampung, mengambil program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah Pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2021.

Saat duduk di bangku SMP sampai dengan SMA, pernah aktif dalam organisasi, OSIS, dan Paskibra. Demikian halnya saat menjadi mahasiswa S1 di UIN Raden Intan Lampung, pernah aktif dalam organisasi Intra Kampus, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), sebagai Sekretaris Bidang Hak Asasi Manusia dan Advokasi (2019-2020).



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah dengan Penambahan Beban Kerja Pada Pengasuh Bayi (*Babysitter*)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada proram strata (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari'ah. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak DR.H. Yusuf Baihaqi, LC.M.A., selaku dosen pembimbing I yang selalu meluangkan waktu memberikan arahan, masukan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I selaku dosen Pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikan nya skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan ilmunya kepada penulis selama di bangku kuliah. Semoga ilmu yang diajarkan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.

6. Kepala beserta Staff Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Muamalah 2017 Khususnya Muamalah kelas I.
8. Guru-guru ku tercinta dari sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas yang telah mengajarkan ku banyak hal sehingga dapat membaca dan menulis dan mengetahui banyak hal hingga dapat masuk diperguruan tinggi ini
9. Sahabat KKN Rajabasa Raya, PPS PA Gedung Tataan, dan grup kompre yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu terimakasih atas semangatnya
10. Almamater tercinta dan kepada Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pendidikan terbaik. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan berapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Oktober 2021
Penulis,

Aulia Anisa
NPM. 1721030128

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN BIMBINGAN	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Signifikasi Penelitian	7
G. Tinjauan Pustaka.....	7
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>'Ijārah</i>	17
1. Pengertian <i>'Ijārah</i>	17
2. Dasar Hukum <i>'Ijārah</i>	22
3. Rukun dan Syarat <i>'Ijārah</i>	25
4. Pembatalan dan Berakhirya <i>'Ijārah</i>	30
5. Hikmah <i>'Ijārah</i>	30

B. Akad dalam Islam	31
1. Pengertian Akad	31
2. Dasar Hukum Akad	32
3. Rukun dan Syarat Akad.....	32
4. Syarat Keabsahan Akad.....	35
5. Macam-macam Akad	35
6. Hak dan Kewajiban Pekerja	36

BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Secara Umum Kelurahan Rajabasa Raya.....	39
1. Sejarah Berdirinya Kelurahan Rajabasa Raya	39
2. Visi-misi Kelurahan Rajabasa Raya	41
3. Program dan kegiatan Kelurahan Rajabasa Raya	41
4. Profil Desa Kelurahan Rajabasa Raya	42
5. Letak geografis Kelurahan Rajabasa Raya	43
6. Keadaan Geografi.....	43
7. Keadaan Sosial Ekonomi.....	44
8. Keadaan Sosial Budaya	45
9. Struktur Organisasi Kelurahan Rajabasa Raya	46
B. Praktik Pembayaran Upah pengasuh bayi (<i>Babysitter</i>) Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.....	46

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik pembayaran upah pengasuh bayi (<i>Babysitter</i>) kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung	55
B. Analisis hukum islam tentang pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada pengasuh bayi (<i>Babysitter</i>) di Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Rekomendasi	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRA



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama Lurah Sebelum dan Sesudah Berdirinya Kelurahan Rajabasa Raya	40
Tabel 3.2 Batas Secara Administratif Kelurahan Rajabasa Raya.....	43
Tabel 3.3 Jarak ke pusat pemerintahan dari Kelurahan Rajabasa Raya.....	43
Tabel 3.4. Jumlah penduduk Kelurahan Rajabasa Raya.....	44
Tabel 3.5 Data penduduk berdasarkan golongan umur Kelurahan Rajabasa Raya	45
Tabel.3.6 Data penduduk menurut mata pencaharian kelurahan Rajabasa Raya	45
Tabel 3.7 Data penduduk menurut tingkat pendidikan kelurahan Rajabasa Raya	46



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal
- Lampiran 2 Surat Keterangan Izin Riset
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi
- Lampiran 6 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 7 Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 8 Surat Keterangan Hasil Cek Turnitin



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Supaya menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat istilah-istilah dalam judul skripsi ini yang membahas mengenai **“Analisis hukum islam tentang pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada pengasuh bayi (Babysitter) (Studi kasus Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa)”**. Untuk itu perlu diuraikan definisi istilah-istilah judul tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah Swt. Dengan demikian hukum islam menurut *ta'rif* ini mencakup *syara'* dan juga mencakup hukum *fiqh*, karena arti *syara'* dan *fiqh* terkandung didalamnya. hukum islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam diciptakan karena ia mempunyai tujuan. tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Istilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian dunia saja.²
3. Pembayaran adalah berpindahnya hak pemilikan atas sejumlah uang atau dan dari pembayar kepada

¹ Dapatenmen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi 4 (Jakarta: Gramedia, 2008), 58

² Siti Mahmudah, *Historisitas Syariah: Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim*, (Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial, 2016), 115.

penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan.³

4. Upah menurut Islam adalah penukaran atau kepemilikan manfaat atau menjual tenaga dengan imbalan berupa bentuk materi di dunia dan bentuk pahalan di akhirat sebagai penggantinya.⁴
5. Beban kerja adalah sesuatu yang dirasakan berada di luar kemampuan pekerja untuk melakukan pekerjaannya yaitu keadaan dimana pekerja dihadapkan pada tugas yang harus diselesaikan pada waktu tertentu.⁵
6. Pengasuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengasuh, sedangkan mengasuh adalah orang yang menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil.⁶

Berdasarkan penegasan judul di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam skripsi ini adalah meninjau pelaksanaan pembayaran upah mengupah dengan beban kerja tambahan menurut hukum Islam suatu kajian dalam Hukum Islam pada Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya kemajuan teknologi dan pembangunan mengakibatkan semakin meningkat pula pola pemenuhan kebutuhan manusia yang berpengaruh pula terhadap peningkatan aspek kehidupan didalam masyarakat yang berpengaruh terhadap pola hidup serta kebutuhan hidup individu di dalam masyarakat. Pada zaman sekarang banyak orang tua yang merupakan pekerja dan cenderung memiliki banyak aktivitas di luar rumah yang cukup banyak menyita waktu, untuk hal mengurus rumah tangga seperti halnya

³ Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 117.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), 15.

⁵ Munandar, *Stress dan keselamatan Kerja, Psikologi Industri dan organisasi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), 22.

⁶ Dapaten Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. diakses pada 3 januari 2021

mengurus anak, sehingga tidak sedikit orang tua menggunakan jasa pengasuh bayi (*Babysitter*) yang dipercayakan menjaga serta mengasuh anaknya, mayoritas orang tua yang menggunakan jasa *Babysitter* merupakan suami dan istri seorang pekerja. Hal tersebut sebagai salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya penggunaan jasa *Babysitter*. Selain faktor di atas ada banyak faktor lain yang menyebabkan sebagian orang tua lebih memilih menitipkan anaknya kepada *Babysitter* daripada diasuh sendiri. Namun faktor kesibukan orang tua lah yang dominan menjadi alasan para orang tua yang menggunakan jasa *Babysitter*.

Banyaknya orang tua yang menggunakan jasa *Babysitter*, mengakibatkan semakin bertambah pula jumlah *Babysitter* di berbagai daerah. Biasanya *Babysitter* menemukan majikan melalui penyaluran oleh teman, tetangga atau bahkan saudaranya sendiri, perjanjian kerja antara majikan dan *Babysitter* terjadi secara lisan tidak memiliki perjanjian kerja secara tertulis. Perjanjian kerja dalam pekerjaan terjadi hanya secara lisan, disampaikan dengan saling memahami peran masing-masing, sehingga tidak ada kejelasan dalam hal jenis kerja, jam kerja, dan upah yang diterimanya. Sejak awal hal ini menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan. Seperti hal nya yang terjadi di lapangan penelitian pada Kelurahan Rajabasa Raya terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan akad perjanjian antara majikan dan *Babysitter*, gaji yang diberikan setiap satu bulan kerja dengan kesepakatan pekerjaan hanya mengasuh bayi saja namun di luar kesepakatan bahwa *Babysitter* yang hanya bertugas sebagai pengasuh bayi saja melainkan mendapatkan penambahan beban kerja lain, melakukan pekerjaan rumah tangga lain, seperti membersihkan rumah, mencuci dan melakukan pekerjaan lain diluar kesepakatan namun dengan nominal upah yang diberikan sama dengan pembayaran upah yang sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerja yaitu hanya mengasuh bayi. Dengan adanya penambahan beban kerja tersebut pembayar upah tidak diiringi dengan penambahan upah yang diberikan oleh

pengguna jasa *Babysitter*, upah yang diberikan diberikan hanya sejumlah pada kesepakatan perjanjian kerja yaitu hanya upah sebagai pengasuh bayi tanpa pemanbahan kerja lain.

Upah atau gaji merupakan hak bagi setiap orang yang bekerja dalam pemenuhan ekonomi yang tidak boleh diabaikan dan kewajiban bagi pihak majikan ataupun pihak yang mempekerjakan untuk memenuhinya. Dalam perjanjian pengupahan kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan yang merugikan kedua belah pihak. Hukum pembayaran upah sebagai bagian dari Hukum Islam di bidang muamalah, memiliki sifat terbuka yang, segala sesuatu di bidang muamalah boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan atau melanggar larangan yang sudah ditentukan.

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an:



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukumhukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. al-Mā'idah[5]:1)

Berdasarkan ayat di atas hendaknya majikan dan pekerja menunaikan hak dan kewajiban masing-masing, sesuai dengan berdasarkan akad (Kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerja sama antara pekerja dengan majikan atau pekerja yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak yang tidak boleh dilanggar. Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat

imbalan dari apa yang dikerjakan. Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, untuk itu harus dibayar tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi suatu penyelewengan sebagai mana dilapangan tempat penelitian yaitu terjadi penambahan beban kerja diluar kesepakatan dikarenakan suatu hal lain yang dibebankan oleh majikan kepada *Babysitter*, untuk itu maka pemberian upah atau imbalan yang layak kepada mereka menyesuaikan dengan apa yang telah mereka kerjakan yang dibebankan diluar akad kesepakatan perjanjian di awal.

Akad perjanjian yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga antara upah yang dibayarkan akad perjanjian kerja menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun buruh, supaya tercipta kesejahteraan sosial. Konsenkuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem kerja harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara majikan dan pekerja. Kewajiban pengupahan dan akad perjanjian yang ditentukan oleh Islam hendaknya setiap pemilik hak dan pemberi kewajiban menunaikan hak dan kewajibannya dengan cara yang adil, tidak kurang dan tidak lebih

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka akan dikaji lebih mendalam terkait pelaksanaan pembayaran upah *Babysitter* dengan penambahan beban kerja dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pembayaran upah *Babysitter* dengan penambahan beban kerja, penulis tuangkan dalam sebuah judul “Analisis Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah dengan Penambahan Beban Kerja pada Pengasuh Bayi (*Babysitter*)” (Studi Pada Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung).

C. Fokus Penelitian dan sub- Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mengarahkan pada persoalan pembayaran upah pengasuh bayi dimana dalam penerapannya apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku, sehingga peneliti akan di fokuskan

pada “Analisis Hukum Islam tentang pembayaran upah pengasuh bayi (*Babysitter*) pada Kelurahan Rajabasa Raya kecamatan Rajabasa Bandar Lampung, Fokus Penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut:

1. Yang menjadi objek penelitian ini adalah penambahan beban kerja lain di luar kesepakatan antara majikan dan *Babysitter* pada Kelurahan Rajabasa Raya kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.
2. Batasan masalah pada penelitian ini adalah pada praktik pembayaran upah *Babysitter* pada Kelurahan Rajabasa Raya kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada pengasuh bayi (*Babysitter*) di Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam mengenai praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada pengasuh bayi (*Babysitter*) Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian yang di lakukan pada dasarnya memiliki tujuan yang ingin di capai yang berkaitan langsung dalam menunjukan hasil penelitian pada setiap penelitian yang di lakukan. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembayaran upah pengasuh bayi (*Babysitter*) di Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Islam mengenai pembayaran upah pengasuh bayi (*Babysitter*) di

Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memebrikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi masyarakat umum. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai beriku:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan terkait pembayaran upah pengasuh bayi sekaligus diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas terutama dikalangan mahasiswa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat islam, serta penelitian ini dimaksud sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah jurusan muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan juga dapat menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu di lakukan tinjauan pustaka untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok masalah. Sampai saat ini, penyusunan belum menemukan kajian yang secara khusus membahas tentang pembayaran upah pengasuh bayi Babysitter dalam analisis hukum islam dan hukum positif . untuk menghindari plagrisme dan kesamaan, maka berikut ini penelitian sampaikan beberapa hasil penelitian sampai beberapa hasil penelitian yang sebelumnya memiliki relevansi dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi Hendri Juliansyah (2015) fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang dengan judul perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga menurut permenaker nomor 2 tahun 2015 menyimpulkan bahwa bentuk Perlindungan Hukum terhadap pekerja Rumah Tangga telah dijawab oleh pemerintah dengan adanya permensker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pengguna (majikan) dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain di wilayah dimana PRT akan bekerja, dan dalam perjanjian kerja tersebut dijelaskan tentang hak dan kewajiban masing masing pihak yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi kedua belah pihak.⁷

Kedua, skripsi Abdul husen (2021) fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi pemenuhan hak penghasilan (upah) pekerja rumahan sektor usaha alas kaki di muara baru Jakarta utara DKI Jakarta kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu Kesepakatan kerja yang dijamin oleh pekerja rumahan dengan pemberi kerja sebagai pelaksanaan kebijakan pengaturan pekerja rumahan yaitu hanya melalui perjanjian kerja secara lisan, yang mana ketika pengusaha melalui seseorang yang biasa disebut pemberi kerja mendatangi para pekerja rumahan ataupun melalui perantara penanggung jawab wilayah pekerja rumahan tersebut lalu mereka melakukan kesepakatan antar keduanya terkait sistem kerja yang akan dilakukan, dalam perjanjian secara lisan tersebut biasanya termuat tentang apa yang akan dikerjakan oleh pekerja rumahan, berapa upah yang akan mereka dapat dari produk yang telah dihasilkan dan tenggat waktu yang diberikan oleh pemberi kerja untuk

⁷ Hendri Juliansyah, *perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga menurut permenaker nomor 2 tahun 2013*, (Skripsi fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang, 2015)

menyelesaikan produk tersebut. Setelah itu mereka hanya diberikan bahan pokok dari produk yang harus dikerjakan, terlepas itu semua pekeja rumahan yang menanggungnya. Pekerja rumahan tidak mengetahui hak yang seharusnya didapatkannya dan kewajiban yang harus dijalankannya dengan jelas.⁸

Berdasarkan literatur di atas belum ada penelitian yang membahas tentang Analisis Hukum Islam tentang Pembayaran Upah dengan Penambahan Beban Kerja pada Pengasuh Bayi (*Babysitter*). Pengkajian ini lebih menekankan kepada pembayaran upah dengan penambahan beban kerja yang dibayarkan kepada *Babysitter* dengan demikian penelitian ini layak untuk di lakukan dan terhindar dari duplikasi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitaian dilaksanakan. Untuk menjawab permasalahan yang terumuskan dilaksanakan.⁹ Untuk menjawab permasalahan yang terumuskan dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode penelitian akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian di gunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas suatu permasalahan.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung di lakukan di lapangan atau pada responden. Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui

⁸ Abdul husen, *pemenuhan hak penghasilan (upah) pekerja rumahan sektor usaha alas kaki di muara baru jakarta utara dki jakarta*, (Skripsi fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta, 2021)

⁹ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 21.

¹⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994., 2.

dan menganalisis pembayaran upah dengan penambahan kerja pada *Babysitter* Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung. Dalam hal ini Penulis akan langsung mengamati, untuk memperkuat studi lapangan serta menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian terdahulu.¹¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul. Penelitian deskriptif analisis menitikberatkan pada observasi dan *setting alamiah*. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya serta memberikan penilaian sesuai atau tidaknya pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada *Babysitter*.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara (*interview*).¹² Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, dimana penelitian bersumber pada *Babysitter* dan majikan yang memberikan penjelasan berupa wawancara serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber primer yang terdiri dari:

¹¹ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014),. 9.

¹² J Supranto, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 2.

1) Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum Primer merupakan sumber hukum yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian yang terdiri dari al-Qur'ān dan hadis.

2) Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder merupakan sumber hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Data Sekunder digunakan untuk melengkapi data primer yang berupa: Buku, jurnal, artikel, dokumen, internet, dan sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang di perlukan dari objek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹³ Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara, dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperkukan. Untuk mempermudah dalam melaksanakan observasi ini menghindarkan rasa kekeluargaan terlebih dahulu untuk menghindarkan rasa kaku, takut dan lain sebagaimana dapat mengganggu jalanya observasi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data bagaimana praktik pembayaran upah *Babysitter* di Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud

¹³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),. 70.

tertentu oleh kedua belah pihak yaitu peneliti sebagai pengaju dan pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk menggali data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada *Babysitter* di Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dokumen yang merupakan catatan dari peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti, mencari data-data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti terkait penelitian ini.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jenis dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media, dan sebagainya.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini yang berjumlah 210 orang, adapun metode penentuan jumlah populasi dengan teknik pengambilan secara terbatas (*finite population*) yaitu kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang diketahui batas wilayahnya atau dapat dilakukan pengukuran mengenai jumlah individu yang terdapat di wilayah yang ditempati.¹⁵ Sehingga penelitian ini difokuskan di wilayah lingkungan 1 yang berjumlah sebanyak 9 Rukun Tetangga (RT) kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa.

¹⁴ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 95

¹⁵ http://file.upi.edu/direktori/dual-modes/penelitian_pendidikan/bbm_6.pdf diakses pada Rabu, 25 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian.¹⁶ Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu teknik pengambilan data dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan fenomena yang diteliti.¹⁷ Jumlah sampel terpilih dalam penelitian ini adalah 10 (Sepuluh) orang yang terdiri atas 5 (Lima) orang Majikan beserta 5 (Lima) orang *Babysitter*.

Adapun alasan menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena dalam penelitian. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian yang memenuhi poin-poin sebagai berikut;

1. Letak wilayah pengambilan sampel strategis dilihat dari tingkat pendidikan yang tinggi, perekonomian mapan dan masyarakat yang potensial.
2. Majikan merupakan seorang pekerja baik suami maupun istri memiliki kesibukan ekstra, banyak menghabiskan waktu di luar rumah, serta apabila di total perbulan majikan berpenghasilan di atas Rp. 10.000.000.
3. *Babysitter* yang mendapat penambahan beban kerja oleh majikan tanpa diberi upah lebih dari yang telah disepakati.

5. Metode Pengelolaan Data

Data yang terkumpul kemudia diolah. Pengelola data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1991), 102.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 45.

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah selesai atau relevan dengan masalah yang di kaji.¹⁸

b. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah.

c. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber. Metode analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber.¹⁹ Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif melalui cara berfikir dengan metode induktif. Metode induktif yaitu cara berfikir dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dari fakta tersebut di tarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁰ Metode ini di gunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada *Babysitter* di Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematikan menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain, sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: cover skripsi, halaman sampul, halaman abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto,

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 128.

¹⁹ Lexi J.Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 190.

²⁰ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2015), 182.

persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran.

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan. Metode penelitian, sistematika pembahasan.

Pada bab kedua atau landasan teori disini menjelaskan tentang teori - teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi, teori-teori tersebut nantinya akan dipakai sebagai alat untuk menganalisis data sehingga menghasilkan temuan penelitian.

Pada bab ketiga atau Deskripsi objek penelitian yaitu peneliti menguraikan tentang fakta-fakta temuan lapangan dengan data-data yang ditemukan di lapangan. Selain itu, bagian ini juga mendeskripsikan data penelitian sesuai dengan fokus dan pertanyaan penelitian yang diajukan.

Pada bab keempat atau analisis penelitian yaitu peneliti menganalisa terhadap fakta-fakta dan data-data yang ditemukan dalam penelitian sebagaimana yang telah disajikan pada bab tiga. Dalam konteks ini, peneliti membahas temuan penelitian.

Pada bab kelima atau penutup berisi kesimpulan, sara-saran atau rekomendasi. Kemudian pada bagian akhir berisi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran; instrumen pengumpulan data, dokumen, surat-surat perizinan, surat keterangan telah melakukan penelitian dari instansi yang diteliti, *curriculum vitae* dan bukti bimbingan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *'Ijārah*

1. Pengertian *'Ijārah*

Manusia sebagai makhluk sosial akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidup guna untuk kelangsungan hidupnya. Sementara itu, kebutuhan manusia yang begitu banyak dan sangat beragam sehingga tidak mungkin terpenuhi dengan mengisolasi diri dari sesamanya, oleh karena itu terciptalah interaksi antara seseorang dengan orang lain. Disamping kebutuhan materi, manusia dihadapkan pada kebutuhan jasa, disinilah terjadi keseimbangan antara orang mengerahkan tenaga untuk menghasilkan harta dan orang lain membutuhkan jasa tenaga mereka.

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *'ijārah* yang berasal dari kata *al-'ajru* yang berasal *al-'iwadh* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. Dari sebab itu *Aṣ-ṣawāb* (pahala) dinamai *'ajru* (upah). Menurut pengertian *syara'*, *'ijārah* ialah : suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²¹ Secara etimologi *'ijārah* ialah upah atau sewa yang diberikan pada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *al-'ujrāh* dan *'ijārah* . Kata *'ajrā-hu* dan *'ajārah-hu* digunakan apabila seseorang memberi imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan untuk hal-hal positif bukan hal-hal negatif. Kata *al-'ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan diakhirat, sedangkan kata *'ujrāh* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.²²

'Ijārah atau sewa-menyewa dalam bahasa arab

²¹ Sayyid Sabiq, *fikih sunnah* terjemah Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT Alma'arif, 1987)., 7.

²² A. Riawan Amin.Sc, *Buku Pikir Transaksi Syari'ah* (menjalankan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa berdasarkan Panduan Islam), (Jakarta Selatan : PT Mizan Publika, 2010)., 14.

dikenal dengan istilah *'ijārah* yang berasal dari kata *'ajāra* dan memiliki beberapa sinonim, dapan diartikan menyewakan, memberinya upah dan memberinya pahala. Sayid Sabiq mengemukakan, bahwa *al-'ijārah* berasal dari kata *al-'ajru* yang berarti sewa atau imbalan ganjaran atau pahala. Pada dasarnya *'ijārah* adalah salah satu bentuk kegiatan antara salah satu pihak, dengan pihak lain serta merupakan bentuk kegiatan sosial yang saling menolong antara sesama manusia sesuai dengan ajaran agama.²³

Dalam bahasa Arab *'ijārah* diartikan sebagai sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian jumlah uang. Menurut termologi *'ijārah* adalah akad sewa menyewa dengan mengambil manfaat sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. *'Ijārah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah diisyaratkan dalam Islam. Hukum asalnya boleh atau mubah bila dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum *'ijārah* berdasarkan kepada ayat-ayat al-Qur'ān dan Hadis Nabi.²⁴ Menurut ahli *fiqh* dilihat dari segi objeknya akad *'ijārah* dibagi menjadi dua macam, yaitu *'ijārah* yang bersifat benda, *'ijārah* bersifat jasa yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. *'Ijārah* manfaat benda seperti sewa-menyewa toko, rumah, kendaraan dan pakaian. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* yang untuk dipergunakan, maka para ulama *fiqh* sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Bentuk *'ijārah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional, pihak yang menyewakan disebut *mu'ajir* atau *mu'jir* dan biaya disebut *'ujrāh*. *Ijarah* manfaat dibagi menjadi tiga macam yaitu, *'ijārah* benda yang tidak bergerak, *'ijārah*

²³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada , 1993), 30.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Gari-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), 216.

²⁵ Muhammad, *Kebijakan Fisikal dan Moneter Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Selemba empat patria, 2004), 113.

kendaraan baik tradisional maupun modern, dan ijarah barang-barang yang bisa dipindah-pindahkan.

- b. *Ijārah* yang berupa jasa merupakan *‘ijārah* yang objeknya adalah pekerjaan atau jasa seseorang, pihak yang mempekerjakan disebut *musta’jir* pihak pekerja disebut *ajr* dan upah yang dibayarkan disebut *‘ujrah*, seperti buruh bangun, tukang jahit, pekerja rumah tangga dan dokter. *‘ijārah* jenis ini dibagi menjadi dua macam yaitu, *‘ijārah* manfaat manusia bersifat umum dan ijarah manfaat manusia bersifat khusus²⁶.

Beberapa definisi *‘ijārah* yang dikemukakan oleh ulama *fiqh*, yaitu Ulama Hanafiyah mendefinisikan *‘ijārah* yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat, yang diketahui dan disenghaja dari barang yang disewakan dengan cara pergantian (bayar).²⁷ Ulama Syafi’iyah mendefinisikan bahwa “*‘ijārah*” yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan disenghaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan pengganti yang diketahui jelas.²⁸ Menurut pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah upah atau biaya sewa belum berstatus positif dan menjadi wajib hanya oleh sebab akad itu sendiri, akan tetapi upah atau biaya sewa menjadi positif dan wajib ketika pihak yang bersangkutan telah mendapat kemanfaatan yang dimaksud dengan secara nyata atau dengan menjadikannya bisa mendapatkan kemanfaatan tersebut. Karena pada saat itulah, sesuatu yang menjadi objek akad menjadi milik *musta’jir* (pihak yang mempekerjakan).²⁹ Menurut Labib Mz yang dimaksud dengan *‘ijārah* adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah

²⁶ Sunarto dan Zulkifli, Panduan Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 44.

²⁷ Abdurahman Al-Jaziri, kitab *al-fiqih ala al-mazhab al-arba’ah jilid 3* (Beirut: Dar al Fikr, 1991), 94

²⁸ *ibid*, 98.

²⁹ Wabah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam 7 Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 86.

disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan oleh orang yang menerimanya bahwa orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun-rukun tertentu.³⁰

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *'ijārah* merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah). Akad *'ijārah* tidak boleh di batasi oleh syarat, akad *'ijārah* juga tidak berlaku pada pepohon untuk diambil bahunya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *'ijārah* hanya ditunjukkan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *'ijārah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa upah juga terdapat perbedaan makna opresional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah sedangkan upah digunakan untuk tenaga seperti para buruh bekerja pada majikannya dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Jadi dapat dipahami bahwa *'ijārah* adalah menukar suatu dengan adanya imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.³¹

'Ijārah dalam pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajir*. Dengan demikian, *'ijārah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.³² *'Ijārah* dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi

³⁰ Labib Mz, *Etika Bisnis dalam Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 39.

³¹ *Ibid.*

³² Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 15.

pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad '*ijārah*' ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad '*ijārah*' adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad ijarah terkadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad '*ijārah*' tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bias berasal dari tenaga manusia. '*ijārah*' dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.³³

Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, '*ijārah*' ialah kepemilikan harta dari seorang yang dikontrak tenaganya ('*ajir*') oleh orang yang mengontrak tenaganya (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari *musta'jir* oleh '*ajir*', dimana '*ijārah*' merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan).³⁴ Sedangkan Menurut pernyataan Profesor Benham, '*ujrah*' adalah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.³⁵ Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian.³⁶ Islam menetapkan suatu pembahasan dalam kitab *fiqh*, yang terdapat dalam *al-ijārah*. '*ijārah*' merupakan suatu jenis akad antara dua pihak yang berkaitan dengan manfaat atau jasa dalam tempo yang telah disepakati berdasarkan ketentuan Syari'at Islam.

³³ M Yarid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, t.th), 180

³⁴ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi)* (Jakarta: Kencana, 2015), 231.

³⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 361.

³⁶ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 141.

2. Dasar Hukum ‘*ijārah*

a. Al-Qur’ān

Pada dasarnya praktik ‘*ijārah* diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur’ān:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِعُرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أٰخَرٰى (سورة الطلاق : ٦)

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. At-ṭalāq [65]: 6).

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika seorang ibu menghendaki agar bayi-bayi diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang pantas kepada mereka, agar tidak salah satu pihak yang dirugikan dan menguntungkan pihak lain.³⁷

³⁷ Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *tafsir Al-maraghi*, chat pertama (Semarang: CP. Toha Putra, 1984), 350.

b. Hadis

Diriwayatkan oleh Abu dzar, bahwa Nabi SAW. Bersabda :

وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ (رواه البخاري. ٣٠)³⁸

“janganlah kalian membebani mereka (budak) dengan apa yang dapat membebani mereka, jika kalian memberikan tugas kepada mereka bantulah mereka”
(H.R. Bukhori, Nomor 30)

Berdasarkan hadis tersebut memberikan beban tugas tambahan kepada pekerja melebihi ketentuan yang disepakati hal tersebut dilarang, jikapun terpaksa itu harus dilakukan, maka majikan diperintahkan agar turut membantunya, apabila tidak membantu dengan tenaga maka hendaknya membantu dengan menambahkan upahnya kepada pekerja apabila telah menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan.

c. 'Ijmā'

Mengenai disyariatkannya 'ijārah, semua umat bersepakat tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ('ijmā') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.³⁹ Umat Islam pada masa sahabat telah ber-'ijmā' bahwa 'ijārah dibolehkan sebab manfaat bagi manusia.⁴⁰ 'ijmā' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'ān dan hadis. Umat sepakat 'ijārah dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini). Dari penjelasan di atas mengenai dasar hukum 'ijārah dalam 'ijmā', ulama telah

³⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana. 2010), 45.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah dan Takhrij Hadidits* (Bandung: Penerbit Pena, 2010), 11.

⁴⁰ H. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Media, 2001), 123-124.

sepakat bahwa Ijarah belum ada dalil yang melarangnya. 'ijārah baik dalam sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan.⁴¹ Mengenai disyaratkan 'ijārah, semua umat bersepakat bahwa sewa-menyewa adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan 'ijmā' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.⁴²

d. Dasar Hukum Undang-undang

Upah merupakan salah satu hak normatif seorang pekerja atau yang disebut buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada majikan atau pemberu kerja yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Bab I Pasal I angka 30 Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan menegaskan: "*Upah adalah hak pekerja/atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberian kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan*".⁴³ Tujuan pemerintahan mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari sewenang-wenang pengusaha dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan

⁴¹ Hasan saleh, *Kajian Fiqih Nawawi & Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), 387

⁴² Lalu husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 145.

⁴³ Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

dilindungi oleh Undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya. Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil *syara'* dan juga dari perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa dan upah mengupah, dengan kata lain sewa menyewa atau upah mengupah diperbolehkan dalam hukum islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara *syar'i* dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh. Tujuan pemerintahan mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari sewenang-wenang pengusaha dalam pemberian upah. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh Undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya. Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil *syara'* dan juga dari perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa dan upah mengupah.

3. Rukun dan Syrat '*ijārah*

a. Rukun '*ijārah*

Menurut Hanafiah, rukun '*ijārah* hanya satu yaitu ijab dan kabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Rukun dari '*ijārah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.⁴⁴ Mazhab Hanafi,

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), 216

mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak objek akad. Mereka mengatakan: Adapun sewa menyewa adalah ijab dan qobul, sebab seperti apa yang telah diketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa menyewa adalah sifat yang denganya tergantung kebenarannya (sahnya) sewa-menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-menyewa. Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu ijab dan qobul. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat sendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa-menyewa itu sendiri. Adapun menurut jumhur Ulama rukun '*ijārah*' ada (4) empat yaitu ⁴⁵:

- 1) *Āqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *Mu'ajir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu disebut *Musta'jir*. Yang karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyatan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.
- 2) *Ṣīghat* yaitu pernyataan kehendak yang lazimnya disebut akad *Ṣīghat* (*Ṣīghatul-'aqd*), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian islam ijab dan qabul dapat melalui: ucap, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dengan diam semata. Syarat-syaratnya '*ijārah*' sama dengan ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam harus

⁴⁵ *Ibid.*, 217

menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁴⁶

- 3) Upah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajir*. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan disebutkan juga besaran dan bentuk upah..⁴⁷ Ulama Malikiyah membolehkan menyewa seseorang untuk melayani atau menyewa hewan ditambah makannya dan pakaiannya atau sejenisnya untuk pembantu itu. Hal itu karena sudah menjadi hal yang umum dalam masyarakat sebagaimana menyewa seorang perempuan untuk menyusui ditambah makan dan lainnya.⁴⁸ Syarat yang lainnya yaitu harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, dapat dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat dipastikan kehalalannya, upah yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan bersama.

- 4) Manfaat yaitu untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasiq*.⁴⁹

b. Syarat *'ijārah*

Pertama, Syarat terjadinya akad syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat utama bagi pihak yang melakukan *'ijārah* ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan ijarah itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh sebab itu, orang yang gila atau anak

⁴⁶ Mustafa Did Al-Bugha, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 874.

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 231.

⁴⁸ Wahba Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

⁴⁹ *ibid.*, 385

kecil yang *mumayyiz* tidak sah melakukan *'ijārah*. Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan *'ijārah* ketika ia dalam keadaan sakit. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah *mumayyiz* saja.⁵⁰ Kedua, syarat pelaksanaan *'ijārah*, akad *'ijārah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *'ijārah* terhadap benda milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *'ijārah* tidak sah. Ketiga, syarat sah yaitu terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad, dan upah.⁵¹ Syarat sah *'ijārah* adalah sebagai berikut:⁵²

- 1) Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *'ijārah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.⁵³
- 2) Objek akad yaitu manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad.⁵⁴ Kejelasan akad *'ijārah* bisa dilakukan dengan dengan menjelaskan:
 - a) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan.

⁵⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h.29.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Ghuffran A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Imam Mustofa, *Op.Cit.*107.

Apabila seorang mengatakan, “saya sewakan kepadamu salah satu dari rumah ini” maka akad *‘ijārah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.

- b) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari di sewa.
- c) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model yang tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju lengkap celana, dan ukurannya jelas.
- d) Objek sewa harus jelas dapat dipenuhi dan dapat diserahkan berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewa jasanya. Objek sewa juga harus terpenuhi secara *syar’i*, oleh karena itu, tidak sah sewa jasa sapu dari orang yang sedang haid atau menyewa orang untuk mengajari sihir. syarat ini sudah menjadi kesepakatan dikalangan ulama *fiqh*.⁵⁵
- e) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara *syara’*, seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang *syara’*. Berdasarkan hal ini maka tidak boleh menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan atau menganiaya orang lain. Karena hal itu dilarang, dan secara *syara’* tidak boleh dipenuhi.⁵⁶

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 318.

⁵⁶ Imam Mustofa, *Op.Cit.*, h.108.

4. Batal dan Berakhirnya Upah.

Ada beberapa hal yang menyebabkan batal dan berakhirnya upah mengupah, yaitu:⁵⁷

- a. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan
- b. Berakhirnya masa yang telah ditentukan
- c. Selesaiannya pekerjaan.
- d. Pembatalan akad.

5. Hikmah Upah.

Tujuan dibolehkan *'ijārah* pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Adapun hikmah diadakannya *'ijārah* antara lain:⁵⁸

- a. Membina ketentraman dan Kebahagiaan

Adanya *'ijārah* akan mampu membina kerja sama antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang member jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka *musta'jir* tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah Swt. Transaksi upah mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama di bidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi.

- b. Memenuhi nafkah keluarga

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggung jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima *musta'jir* maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 29, 34

⁵⁸ Tersedia di <https://www.bacaanmadani.com> diakses pada 23 februari 2021 Pukul.07.26 WIB

c. Memenuhi hajat hidup masyarakat.

Adanya transaksi *'ijārah* khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil kerja tersebut. Maka upah merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.

d. Menolak kemungkaran.

Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh orang yang menganggur. Pada intinya hikmah *'ijārah* yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan.

B. Akad Dalam Islam

1. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti diantaranya adalah *'aqdu* yang berarti mengikat dan *'ahdu* yang berarti janji.⁵⁹ Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* bentuk jamaknya adalah *al-'uqūd* yang mempunyai arti perjanjian, persetujuan dan buah atau lebih perikatan.⁶⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah perikatan ijab qabul yang di benarkan syara yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan, ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.⁶¹

Dalam terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai berikut, akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak. Sedang qabul adalah pernyataan atau

⁵⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), 274.

⁶⁰ Huda Qomaru, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, Cet I, 2011), 25.

⁶¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), 15.

ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.⁶²

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum dilakukannya akad Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ
(سورة المائدة : ١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. al-Mā'idah[5]:1)

Ayat di atas menerangkan bahwa para mukmin diwajibkan untuk menyempurnakan perjanjian-perjanjian Allah yang dipertegas, berupa keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat agama dan ketundukan kepadanya. Dan penuhilah perjanjian sebagian kalian atas sebagian yang lain berupa amanat, jual-beli dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶³

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun akad

Dalam pengertian para *fuqāha'* rukun adalah asas,

⁶² Gufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Ed. 1., Cet. 1, 2002), 76-77.

⁶³ Syakir, Syaikh Ahmad. *Mukhtasar (Ringkasan) Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Darus Sunnah, Jilid: III, 2004)

sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keikhlasan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad.⁶⁴ Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

- 1) *Āqid* ialah orang yang berakad yaitu penyewa jasa (majikan) dan penyedia jasa (*Babysitter*).
- 2) *Ma'qūd 'alaih* yaitu setiap sesuatu yang menjadi obyek akad, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah besaran upah yang diberikan, rician pekerjaan yang dibebankan dan fasilitas yang diberikan oleh penyewa jasa (majikan). Diantara syaratnya ialah:⁶⁵
 - a) Objek akad harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesamaran dan penipuan serta perselisihan di kemudian hari, baik rician, sifat, bentuk maupun kualitasnya.
 - b) Objek akad hal yang diperbolehkan.
 - c) Objek akad harus ada ketika akad sedang berlangsung, atau ada di tempat.
 - d) Objek akad dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- 3) *Mawḍu' al-'aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Manfaat ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dalam hal sistem pengupahan ini tujuan dasarnya adalah tolong menolong memberikan dan menggunakan suatu manfaat dengan adanya pengganti atau upah sebagai imbalan.⁶⁶

⁶⁴ Nur Huda, *Fiqh Muamalah* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 110.

⁶⁵ *Ibid.*.

⁶⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),

- 4) *Ṣighat al-‘aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilakukan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

b. Syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain. Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan.⁶⁷ Adapun syarat terbentuknya akad sebagai berikut yaitu:⁶⁸

- 1) *Ṣighat* (pernyataan dalam kehendak) adanya kesesuaian ijab dan qabulnya dilakukan dalam suatu majlis akad.
- 2) Berbilangnya para pihak
- 3) Berakal
- 4) Objek akad dapat diserahkan
- 5) Objek akad ditentukan
- 6) Objek dapat menerima hukum akad

Adapun syarat-syarat akad yang bersifat umum ataupun khusus:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *āqid* yang memiliki barang.
- 4) akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*.
- 5) Akad dapat memberikan faedah.

⁶⁷ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 34

⁶⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, cet I, 2011), 32-33

- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.

4. Syarat Keabsahan Akad

Syarat keabsahan akad adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat in'iqad tersebut terpenuhi. Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi ia belum dipandang sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad yaitu:⁶⁹

- a. Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu.
- b. Tidak menimbulkan kerugian.
- c. Tidak mengandung ketidakjelasan, paksaan, ataupun riba.

5. Macam-macam akad

Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syarak, akad dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut⁷⁰:

- a. Akad *Shahih* Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi 2 macam, yaitu:
 - 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk

⁶⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 51

⁷⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 1982), 65.

melaksanakannya.

- 2) Akad *mawqūf* adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.⁷¹
- b. Akad Tidak *Shahīh*, akad yang tidak *Shahīh* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih dibagi oleh ulama Hanafiyah dan malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:⁷²
 - 1) Akad *Bāṭhil*, adalah yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek akad itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
 - 2) Akad *fasiḍ* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan tersebut tidak jelas. Ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad *Bāṭhil* dan akad *fasiḍ* mengandung esensi yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

6. Kewajiban dan Hak Masing-masing Pihak

a. Kewajiban pemberi kerja dan buruh

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggung jawabkan pekerjaan masing-masing sekiranya terjadinya kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggung jawabkannya apakah dengan cara menggati atau sangsi lainnya. Pemberi kerja harus

⁷¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta :Amzah, 2010), 20.

⁷² *Ibid.*,

bertanggung jawab atas pemberian upah kepada pekerjanya, memperlakukan pekerja dengan baik serta berlaku adil dalam pemberian upah, begitu juga dengan buruh hendaklah bertanggung jawab atas pekerjaannya yang ia terima dari pemberi kerja dan diselesaikan dengan baik.

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Zufar Bin Huzail dan Syafi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka pekerja itu dituntut ganti rugi. Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani (murid abu hanifah), berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik senghaja maupun tidak. Berbeda dengan kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran. Menurut mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti barang binatu, juru masak, buruh angkut (kuli), maka baik senghaja atau tidak senghaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu wajib ganti rugi.⁷³

b. Hak pemberi kerja dan buruh

Setiap orang yang melakukan akad harus sesuai dengan ketentuan dan memenuhi hak masa-masa masing yakni :⁷⁴

- 1) Pemberi kerja berkewajiban memberikan upah dan buruh berhak menerima upah
- 2) Pemberi kerja berhak menuntut buruh apabila perja tidak menyelesaikan tugasnya, sedangkan upahnya sudah ia terima dan pekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjaannya.
- 3) Pemberi kerja harus adil dalam memperkerjakan buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah

⁷³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 231.

⁷⁴ *Ibid.*,

pihak.

- 4) Memungkinkan manfaat jika masanya berlansung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhanya.
- 5) Mengalirnya manfaat jika ijarah untuk barang apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, ijarah menjadi batal.
- 6) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, seperti mempercepat bayaran.



DAFTAR RUJUKAN

- A. Riawan Amin.Sc, *Buku Pikir Transaksi Syari'ah*, Menjalankan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa berdasarkan Panduan Islam, Jakarta Selatan : PT Mizan Publika, 2010.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta :Amzah. 2010.
- Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Abdurahman Al-Jaziri, kitab *al-fiqih ala al-mazhab al-arba''ah* jilid 3, Beirut: Dar al Fikr, 1991). 94.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa. 2002.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press. 1982.
- Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *tafsir Al-maraghi*, chat pertama Semarang: CP. Toha Putra. 1984.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah. 2010
- Amir Syarifuddin, *Gari-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Dapatenmen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi 4, Jakarta: Gramedia. 2008.

- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Kencana. 2010.
- Gufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Ed. 1., Cet. 1. 2002.
- H. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamala*, Bandung: Pustaka Media, 2001.
- Hasan saleh, *Kajian Fiqih Nawawi & Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pres. 2008.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1997.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993.
- Hendi Suhendi, *Fiqf Mu'amalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada. 2005.
- Huda Qomaru, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, Cet I. 2011.
- Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi)*, Jakarta: Kencana. 2015.
- J Supranto, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 1994.
- Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing. 2016.

Labib Mz, *Etika Bisnis dalam Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya. 2006.

Lalu husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Rajawali Pres. 2014.

LexiJ, Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 2002.

M Yarid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*, Yogyakarta: Logung. 1999.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada. 2003.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung. 1989.

Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.

Muhammad, *Kebijakan Fisikal dan Moneter Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Selemba empat patria. 2004.

Mustafa Did Al-Bugha, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.

Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.

Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana. 2008.

Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, cet I. 2011.

Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung:PT.Alma'arif. 1987.

Sayyid Sabiq, *fikih sunnah terjemah Kamaluddin A. Marzuki*, Bandung: PT Alma'arif. 1987.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah dan Takhrij Hadidits*, Bandung: Penerbit Pena. 2010.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bima Aksara. 1981.

Sunarto dan Zulkifli, *Panduan Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim. 2003.

Susiadi AS, *Metode Penelitian*, Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Syakir, Syaikh Ahmad. *Mukhtasar (Ringkasan) Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Darus Sunnah, Jilid: III. 2004.

Wabah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam 7 Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani. 2011.

Wahba Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Naskah Ilmiah (Skripsi)

Hendri juliansyah, *perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga menurut permenaker nomor 2 tahun 2013*, fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang, 2015

Abdul husen, *pemenuhan hak penghasilan (upah) pekerja rumahan sektor usaha alas kaki di muara baru jakarta utara dki jakarta*, fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta, 2021.

Online Information (Internet)

<https://www.bacaanmadani.com> (diakses pada 23 februari 2021),
dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

<http://rajabasaraya.site/> (diakses pada 01 juli 2021), dapat
dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Peraturan Hukum

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

